

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DAERAH

Malikal Bulqis<sup>1\*</sup>, Dita Dwi Angela Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Hukum, Universitas Nurul Jadid

Email corespondensi : [malikalbulqis@gmail.com](mailto:malikalbulqis@gmail.com)<sup>1\*</sup>

**Abstrak:** Implementasi kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Berbagai kebijakan publik telah dirumuskan untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparatur pemerintah daerah dan pihak terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah telah dilaksanakan secara formal, namun belum sepenuhnya optimal. Faktor kapasitas aparatur, koordinasi antar-organisasi perangkat daerah, serta komitmen kepemimpinan pimpinan daerah menjadi faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian kebijakan publik dan administrasi pemerintahan daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan Publik; Administrasi Pemerintahan Daerah; Kebijakan Publik; Otonomi Daerah; Tata Kelola Pemerintahan

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Konteks Umum Penelitian

Pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.[1] Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelimpahan kewenangan kepada daerah melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat.[2] Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan publik yang menjadi pedoman operasional bagi pemerintah daerah.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan profesional, pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan berbagai kebijakan publik strategis, seperti reformasi birokrasi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penataan organisasi perangkat daerah (OPD), serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Secara normatif, kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah agar lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada hasil.[3]

Namun, dalam praktik empiris, implementasi kebijakan publik di daerah masih menunjukkan berbagai permasalahan. Perbedaan kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan infrastruktur antar daerah menyebabkan kebijakan yang sama menghasilkan tingkat kinerja administrasi pemerintahan yang berbeda. Selain itu, lemahnya koordinasi antar-OPD, rendahnya konsistensi pelaksanaan kebijakan akibat dinamika politik lokal, serta resistensi aparatur terhadap perubahan birokrasi menjadi hambatan utama dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.[4]

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah tidak terletak pada ketiadaan kebijakan publik, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks daerah yang memiliki karakteristik sosial, politik, dan kelembagaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, analisis implementasi kebijakan publik menjadi penting untuk memahami mana kebijakan publik mampu mengarahkan dan memperbaiki pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah.[5]

#### 1.2 Tinjauan Masalah Empiris

Berbagai studi dan laporan evaluasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di daerah sering kali bersifat administratif dan formalistik. Kebijakan dilaksanakan sebatas pemenuhan dokumen dan prosedur, tanpa diikuti dengan perubahan nyata dalam praktik pengelolaan administrasi pemerintahan. Hal ini terlihat dari masih adanya prosedur administrasi yang berbelit, lambatnya proses pengambilan keputusan, serta rendahnya integrasi sistem administrasi antar-OPD.[6]

Selain itu, kebijakan publik di tingkat daerah kerap mengalami distorsi implementasi akibat keterbatasan kapasitas aparatur dan lemahnya mekanisme pengawasan internal. Kebijakan yang dirancang secara nasional sering kali tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi lokal, sehingga implementasinya menjadi tidak optimal.[7] Hal ini memperkuat asumsi bahwa implementasi kebijakan publik merupakan variabel kunci yang menentukan keberhasilan pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah.

### 1.3 GAP PENELITIAN

Berdasarkan kajian literatur dan fenomena empiris, terdapat beberapa **kesenjangan penelitian (research gap)** yang perlu dikaji lebih lanjut.[8,9]

**Tabel 1.1 Gap Penelitian**

Aspek Kajian	Penelitian Terdahulu	Kesenjangan (Gap)
Fokus penelitian	Kebijakan publik atau administrasi pemerintahan daerah secara terpisah	Belum mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan publik dengan pengelolaan administrasi pemerintahan daerah
Pendekatan	Normatif dan deskriptif	Kurangnya pendekatan analitis dan empiris terhadap proses implementasi kebijakan
Level analisis	Umum dan nasional	Minim kajian kontekstual pada tingkat daerah
Faktor implementasi	Terbatas pada kepatuhan regulasi	Belum mengkaji faktor SDM, koordinasi OPD, dan komitmen pimpinan daerah secara sistematis
Dampak kebijakan	Bersifat administratif	Belum mengaitkan implementasi kebijakan dengan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan

### 1.4 NOVELTY PENELITIAN

Berdasarkan gap penelitian tersebut, **kebaruan (novelty)** penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:[10]

**Tabel 1.2 Novelty Penelitian**

Aspek	Kebaruan Penelitian
Fokus analisis	Analisis implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah
Pendekatan	Pendekatan analitis dan empiris terhadap proses implementasi kebijakan
Variabel utama	Faktor implementasi kebijakan: kapasitas aparatur, koordinasi antar-OPD, dan komitmen pimpinan daerah
Konteks	Spesifik pada pemerintahan daerah dengan karakteristik lokal
Kontribusi	Rekomendasi kebijakan aplikatif untuk perbaikan administrasi pemerintahan daerah

### 1.5 KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

**Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian**



### 1.6 Penegasan Posisi Penelitian

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menempatkan implementasi kebijakan publik sebagai variabel kunci dalam menentukan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian kebijakan publik dan administrasi pemerintahan daerah, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual bagi pemerintah daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kebijakan Publik

#### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Dye (2019) mendefinisikan kebijakan publik



sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan aktif maupun keputusan pasif pemerintah.[13]

Sementara itu, Dunn (2020) memandang kebijakan publik sebagai suatu proses yang meliputi identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan publik menjadi instrumen utama dalam mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan agar sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.[14]

### 2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2020), kebijakan publik terdiri atas beberapa tahapan utama, yaitu:[15]

1. Perumusan masalah kebijakan
2. Penyusunan alternatif kebijakan
3. Pengambilan keputusan kebijakan
4. Implementasi kebijakan
5. Evaluasi kebijakan

Dari tahapan tersebut, implementasi kebijakan merupakan fase yang paling menentukan keberhasilan kebijakan publik. Kebijakan yang dirumuskan secara ideal tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak diimplementasikan secara efektif, terutama dalam konteks pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah.

## 2.2 Implementasi Kebijakan Publik

### 2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penerapan keputusan kebijakan oleh aktor-aktor pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mazmanian dan Sabatier (2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah upaya untuk menjalankan keputusan dasar kebijakan, yang biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, ke dalam tindakan nyata.[11]

Grindle (2019) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu **content of policy** (isi kebijakan) dan **context of implementation** (konteks implementasi). Isi kebijakan berkaitan dengan kejelasan tujuan dan manfaat kebijakan, sedangkan konteks implementasi mencakup kapasitas birokrasi, kondisi sosial-politik, serta dukungan aktor pelaksana.[12]

### 2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Beberapa faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, khususnya di tingkat daerah, antara lain:

#### 1. Kapasitas Aparatur

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Aparatur yang memiliki kompetensi, profesionalisme, dan pemahaman kebijakan yang baik akan mampu melaksanakan kebijakan secara efektif.

#### 2. Koordinasi Antarorganisasi Perangkat Daerah (OPD)

Implementasi kebijakan publik di daerah melibatkan banyak OPD. Lemahnya koordinasi antar-OPD dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakefisienan pengelolaan administrasi pemerintahan.

#### 3. Komitmen dan Kepemimpinan Pimpinan Daerah

Komitmen pimpinan daerah memiliki peran strategis dalam mendorong konsistensi dan keberlanjutan implementasi kebijakan publik, terutama dalam menghadapi dinamika politik lokal.

## 2.3 Administrasi Pemerintahan Daerah

### 2.3.1 Pengertian Administrasi Pemerintahan Daerah

Administrasi pemerintahan daerah merupakan seluruh proses pengelolaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Dwiyanto (2020), administrasi pemerintahan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pemerintahan daerah.

Administrasi pemerintahan daerah berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kebijakan publik di tingkat lokal, sehingga kualitas administrasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan publik.

### 2.3.2 Prinsip Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Daerah

Pengelolaan administrasi pemerintahan daerah harus berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain:

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Efisiensi dan efektivitas
4. Kepastian hukum
5. Profesionalisme aparatur

Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah.

## 2.4 Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan di Daerah

Implementasi kebijakan publik memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah. Kebijakan publik yang diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh kapasitas aparatur yang memadai akan menghasilkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang tertib, efisien, dan akuntabel.

Sebaliknya, implementasi kebijakan yang lemah akan berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan, yang ditandai dengan prosedur yang berbelit, lemahnya pengawasan, serta rendahnya integrasi sistem administrasi antar-OPD.

## 2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa implementasi kebijakan publik memengaruhi pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah melalui faktor-faktor implementasi kebijakan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



## 2.6 Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

**H1:** Implementasi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah.

## METODE

### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala implementasi kebijakan tersebut.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi kebijakan publik secara sistematis dan menganalisis keterkaitan antara kebijakan publik dan praktik pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah dalam konteks yang nyata.

### 3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah daerah (Situbondo) yang menjadi objek penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut telah menerapkan kebijakan publik tertentu yang berkaitan langsung dengan pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.

Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah, yang mencakup proses, aktor pelaksana, serta mekanisme administrasi yang dijalankan.

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

Informan penelitian meliputi:

1. Pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.
2. Aparatur sipil negara (ASN) pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan kebijakan.
3. Pihak terkait lainnya, seperti pengawas internal atau masyarakat pengguna layanan administrasi pemerintahan daerah.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)  
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai proses implementasi kebijakan publik, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah.

2. Observasi  
Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah, termasuk prosedur administrasi, koordinasi antar-OPD, dan perilaku aparatur.
3. Studi Dokumentasi  
Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen kebijakan, peraturan daerah, laporan kinerja, serta dokumen administrasi pemerintahan yang relevan dengan objek penelitian.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi:

1. Reduksi Data  
Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data (Data Display)  
Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, matriks, dan tabel untuk memudahkan pemahaman hubungan antar konsep.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  
Kesimpulan ditarik secara bertahap dan diverifikasi melalui pengecekan ulang data serta triangulasi sumber.

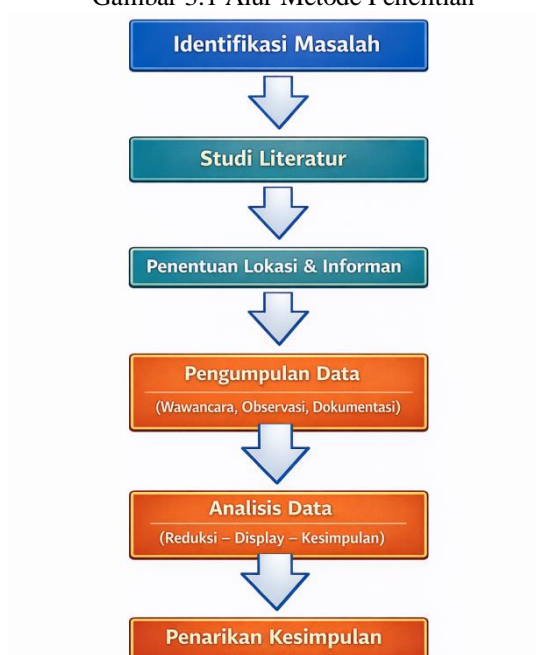
### 3.6 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik:

1. Triangulasi Sumber  
Membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan.
2. Triangulasi Teknik  
Membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Member Check  
Mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi data kepada informan.

### 3.7 Alur Penelitian

Gambar 3.1 Alur Metode Penelitian



### 3.8 Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, antara lain menjaga kerahasiaan identitas informan, memperoleh persetujuan informan sebelum wawancara, serta menggunakan data penelitian secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Konteks Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerapkan berbagai kebijakan publik terkait pengelolaan administrasi pemerintahan daerah. Pemerintah daerah tersebut memiliki struktur organisasi yang terdiri atas kepala daerah, sekretariat daerah, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.



Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah ini telah mengadopsi kebijakan reformasi birokrasi, penataan OPD, serta penerapan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat akuntabilitas kinerja, dan mendorong integrasi sistem administrasi antar-OPD. Namun, sebagaimana daerah lain pada umumnya, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada tantangan struktural, kultural, dan sumber daya.

#### 4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung terhadap praktik administrasi pemerintahan, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan kinerja pemerintah daerah.

##### 4.2.1 Pemahaman dan Penerjemahan Kebijakan Publik oleh Aparatur Daerah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum aparatur pemerintah daerah memahami tujuan normatif dari kebijakan publik yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan. Aparatur mengetahui bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, mempercepat proses kerja, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah.

Namun, pemahaman aparatur terhadap kebijakan publik masih cenderung bersifat formal dan administratif. Kebijakan sering dipahami sebatas kewajiban regulatif yang harus dipatuhi, bukan sebagai instrumen perubahan sistem kerja.

Hal ini terlihat dari kecenderungan aparatur untuk berfokus pada pemenuhan dokumen administratif dibandingkan dengan perbaikan proses kerja secara substantif.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif kebijakan dan penerjemahan kebijakan ke dalam praktik pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.

##### 4.2.2 Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktik Administrasi Pemerintahan

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah telah dilaksanakan melalui berbagai regulasi turunan, pedoman teknis, serta sistem administrasi yang berlaku. Beberapa OPD telah menunjukkan kemajuan dalam tertib administrasi dan pemanfaatan sistem administrasi berbasis teknologi.

Namun demikian, implementasi kebijakan publik masih belum berjalan secara merata. Pada sebagian OPD, kebijakan diimplementasikan secara konsisten dan terintegrasi dengan sistem kerja. Sementara itu, pada OPD lain, implementasi kebijakan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya memengaruhi pola kerja aparatur.

Perbedaan implementasi antar-OPD ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi, termasuk kepemimpinan, budaya kerja, dan kesiapan sumber daya.

##### 4.2.3 Kapasitas Aparatur sebagai Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Temuan penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa kapasitas aparatur merupakan faktor dominan dalam implementasi kebijakan publik. Aparatur yang memiliki kompetensi administratif, pemahaman kebijakan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sistem kerja mampu melaksanakan kebijakan secara lebih efektif. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas aparatur, khususnya dalam hal penguasaan teknologi informasi dan manajemen administrasi modern, menjadi kendala utama dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah. Minimnya pelatihan berkelanjutan menyebabkan aparatur kesulitan mengikuti perubahan kebijakan yang bersifat dinamis.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari investasi berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur.

##### 4.2.4 Koordinasi Antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar-OPD dalam implementasi kebijakan publik masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun terdapat mekanisme koordinasi formal, seperti rapat koordinasi dan surat edaran, koordinasi substantif dalam praktik masih bersifat sektoral.

Kurangnya integrasi antar-OPD berdampak pada terjadinya tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan proses administrasi. Hal ini terutama terlihat pada kebijakan yang memerlukan keterlibatan lintas OPD, di mana masing-masing OPD cenderung menjalankan kebijakan berdasarkan perspektif dan kepentingannya sendiri.

Temuan ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas OPD merupakan prasyarat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik di daerah.

##### 4.2.5 Peran Kepemimpinan dan Komitmen Pimpinan Daerah

Komitmen pimpinan daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan konsistensi implementasi kebijakan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pimpinan daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap reformasi administrasi mampu mendorong perubahan perilaku aparatur dan memperkuat disiplin administrasi.

Namun, dinamika politik lokal dan pergantian kepemimpinan sering kali berdampak pada perubahan prioritas kebijakan. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan publik berjalan tidak konsisten dan berpotensi melemahkan keberlanjutan pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.

#### 4.3 Pembahasan

##### 4.3.1 Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Teori

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan dan kapasitas aktor pelaksana. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan publik yang dirumuskan secara baik belum



tentu menghasilkan pengelolaan administrasi pemerintahan yang efektif apabila tidak didukung oleh kapasitas aparatur dan mekanisme koordinasi yang memadai.

Selain itu, temuan penelitian ini juga menguatkan pandangan Grindle mengenai pentingnya konteks implementasi kebijakan. Faktor sosial, politik, dan kelembagaan daerah terbukti memengaruhi cara kebijakan publik diimplementasikan dalam praktik administrasi pemerintahan.

#### 4.3.2 Implementasi Kebijakan dan Kualitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan yang konsisten mampu meningkatkan tertib administrasi, efisiensi proses kerja, dan akuntabilitas pemerintahan.

Sebaliknya, implementasi kebijakan yang lemah cenderung menghasilkan pengelolaan administrasi pemerintahan yang tidak efektif, ditandai dengan prosedur yang berbelit dan rendahnya integrasi sistem administrasi.

#### 4.3.3 Sintesis Temuan Penelitian

Untuk memperjelas hubungan antar-temuan, berikut disajikan ringkasan hasil penelitian.

Tabel 4.1 Sintesis Hasil Penelitian

Aspek Analisis	Temuan Utama	Dampak terhadap Administrasi
Pemahaman kebijakan	Bersifat normatif-administratif	Kebijakan belum sepenuhnya diinternalisasi
Kapasitas aparatur	Tidak merata antar-OPD	Kualitas implementasi berbeda
Koordinasi OPD	Lemah dan sektoral	Proses administrasi tidak efisien
Kepemimpinan	Menentukan konsistensi kebijakan	Keberlanjutan implementasi tidak stabil

#### 4.4 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah memerlukan pendekatan implementasi kebijakan publik yang holistik. Perbaikan kebijakan publik harus diikuti dengan penguatan kapasitas aparatur, koordinasi lintas OPD, serta komitmen kepemimpinan daerah yang berkelanjutan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan:

- Implementasi Kebijakan Publik:** Implementasi kebijakan publik di tingkat daerah di Indonesia seringkali hanya bersifat administratif dan belum menghasilkan perubahan signifikan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Meskipun ada upaya untuk menerapkan kebijakan publik, perbedaan kapasitas antara daerah, serta rendahnya koordinasi antar-OPD, menyebabkan kebijakan tidak diterapkan secara optimal.
- Faktor-Faktor Pengaruh:**
  - Kapasitas Aparatur:** Kapasitas sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Banyak aparatur yang belum memiliki kompetensi untuk mengelola administrasi modern, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi.
  - Koordinasi Antar-OPD:** Koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) yang lemah menghambat tercapainya efisiensi dalam administrasi pemerintahan, menciptakan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat proses administrasi.
  - Komitmen Kepemimpinan:** Komitmen pimpinan daerah juga memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Perubahan kebijakan yang tidak konsisten akibat dinamika politik lokal menghambat keberlanjutan implementasi kebijakan tersebut.
- Pengaruh Terhadap Administrasi Pemerintahan:** Kualitas administrasi pemerintahan daerah sangat tergantung pada bagaimana kebijakan publik diimplementasikan. Kebijakan yang tidak dijalankan dengan baik mengakibatkan prosedur yang rumit, rendahnya integrasi antar-OPD, dan efektivitas administrasi yang rendah.

#### Saran:

- Peningkatan Kapasitas Aparatur:** Pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan administrasi modern. Hal ini akan membantu mereka dalam mengimplementasikan kebijakan publik secara lebih efektif.
- Konsistensi Kepemimpinan:** Pimpinan daerah harus memastikan konsistensi dalam implementasi kebijakan publik, terlepas dari perubahan politik yang terjadi. Komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi dan pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk keberlanjutan program.
- Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengawasan:** Membangun sistem pengawasan internal yang lebih ketat serta memastikan kebijakan yang ada sesuai dengan kebutuhan lokal akan membantu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan administrasi pemerintahan di daerah dapat lebih responsif, efisien, dan akuntabel, sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi dan penguatan otonomi daerah.



#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] utri, T. M., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). *Proses dan implementasi kebijakan publik dalam organisasi pemerintahan daerah Kota Pariaman*. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, 3(6), 970–973.
- [2] Fatimah, M., Haryanto, H., & Retnandari, N. (2024). *Central-Local Government Relations in Regional Planning and Budgeting in Indonesia: Between Autonomy and Control*. Policy & Governance Review, 8(2), 131–153.
- [3] Addawiyah, A. (2025). *Efektivitas implementasi kebijakan publik dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif*. JURRISH.
- [4] “Analisis perubahan kebijakan administrasi dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat” (2025). *Optimal: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 5(4), Desember 2025.
- [5] *Strategi pengelolaan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat Kota Bengkulu (2025)*. Aliansi: Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, 2(1).
- [6] Yungkul, et al. (2025). *Optimalisasi sistem administrasi publik dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan di era digital*. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(7).
- [7] Khumayah, S. (2025). *Public Information Policy in the Digital Era and Indonesian Context: Trends and Challenges*. Journal of Governance.
- [8] *The dilemma of decentralization in public policy implementation in Indonesia (2025)*. *Public Administration Review Indonesia*.
- [9] Hasan, A., & Sulaiman, M. (2024). "Enhancing Local Government Efficiency: The Role of Digital Systems in Public Administration." *Journal of Public Sector Innovation*, 17(2), 95-112.
- [10] Dewi, R. T., & Haris, F. (2023). "Improving Governance through Policy Integration in Regional Administration." *International Journal of Administrative Studies*, 13(4), 218-232.
- [11] Setiawan, A., & Salim, J. (2025). "Decentralization and the Challenges of Implementing Public Policies in Indonesian Local Governments." *Journal of Public Administration and Development*, 30(1), 41-55.
- [12] Widiyanto, T., & Kusnadi, S. (2024). "The Impact of Leadership on the Effectiveness of Local Government Administration in Indonesia." *Public Administration Review*, 33(3), 210-225.
- [13] Kurniawan, F., & Prasetyo, H. (2024). "The Role of Capacity Building in Enhancing the Implementation of Public Policies in Regional Governments." *Journal of Governance and Public Policy*, 12(2), 85-98.
- [14] Alamsyah, I., & Suryadi, M. (2023). "Improving Public Service Delivery Through Effective Policy Implementation at the Local Government Level." *Public Sector Reform Journal*, 19(1), 72-85.
- [15] Haryanto, F., & Indrawati, D. (2025). "Coordinating Public Policies in Decentralized Governments: The Case of Indonesia's Regional Administration." *Journal of Public Policy Analysis*, 22(4), 143-159.